



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **lima belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **12:19** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

M. Jamil , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2023 memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Selasa** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **11:39** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : M. Jamil
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana
No APPP : 42/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	P-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	1	
7	P-3 Kartu Tanda Penduduk Pemohon (M. Jamil)	1	
8	KTP Kuasa Pemohon (Risky Kurniawan)	1	
9	KTP Kuasa Pemohon (Albert Ola Masan Setiawan Muda)	1	
10	Scan Permohonan, Alat Bukti, dan SKK	3 files (PDF)	Diterima via email MKRI (Senin, 17 April 2023 pukul 23.08 WIB)
11	Permohonan tanggal 15 April 2023	1 rangkap	Asli
12	Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023	1 rangkap	Asli. Pada Bagian Khusus tertulis bila Objek Uji Materi adalah UU 13/2022 (UU PPP)
13	Daftar Alat Bukti tanggal 15 April 2023 untuk Bukti P-1 sd P-3	1 rangkap	Asli
14	Bukti P-1 sd P-3	1 rangkap	Asli
15	Surat Kesalahan Penulisan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2023	1 file (PDF)	Perkara Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.